

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, salah satu tujuan utama setiap negara adalah pembangunan ekonomi. Melalui proses pembangunan yang berkelanjutan, dapat tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, serta terciptanya lapangan kerja yang lebih luas. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran penting untuk mengukur keberhasilan Pembangunan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi di suatu daerah, sekaligus menunjukkan seberapa baik kebijakan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Hal ini menunjukkan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah sebagai tanda keberhasilan dari pembangunan nasional (Sari et al., 2021).

Di Indonesia, yang menghadapi tantangan kompleks akibat pandemi COVID-19 antara tahun 2020 hingga 2024, pemerintah mengambil tindakan dengan kebijakan fiskal yang konsisten. Kebijakan ini termasuk penyesuaian dan pengalihan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang strategis melalui pengoptimalan pengeluaran publik dan pemberian insentif ternyata memberikan dampak positif, dalam mendorong pertumbuhan nasional meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi (Lativa S, 2021).

Ekonomi yang bertumbuh, sebagai ukuran utama keberhasilan dalam Pembangunan, menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa (Kusuma & Purnomo, 2024). Hal ini dapat diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan. Pertumbuhan yang baik mencerminkan tidak hanya meningkatnya aktivitas ekonomi dan pendapatan negara, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, produktivitas, dan stabilitas ekonomi secara umum (Wardoyo, 2024). Namun, di

wilayah Ciayumajakuning pertumbuhan ekonomi tidak berkembang secara merata antara kabupaten dan kota, yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam dinamika Pembangunan di daerah tersebut (Salim & Fadilla, 2021).

Tabel 1. 1

Pertumbuhan Ekonomi Di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Cirebon	-0.98	3.05	5.10	5.01	5,02
Kabupaten Cirebon	-1.80	2.47	4.09	4.85	5.83
Kabupaten Indramayu	-1.58	0.58	2.88	9.76	2.18
Kabupaten Kuningan	0.89	4.75	6.63	6.15	6.38
Kabupaten Majalengka	0.11	3.56	5.53	5.25	5.61

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, Pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning pada periode 2020–2024 menunjukkan tren pemulihan pascapandemi COVID-19. Sebagian besar wilayah mengalami kontraksi ekonomi ada tahun 2020, seperti kota Cirebon sebesar -0,98 persen, kabupaten Cirebon -1,80 persen, dan indramayu -1,58 persen, sedangkan kabupaten kuningan dan kabupaten majalengka masih mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2021 hingga 2024, seluruh daerah menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dan relative stabil, meskipun kabupaten indramayu mengalami fluktuasi pertumbuhan yang cukup tajam. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika pertumbuhan ekonomi antar daerah yang mencerminkan variasi ketahanan ekonomi pengaruh faktor-faktor makroekonomi dalam mendorong kinerja perekonomian di ciayumajakuning.

Permasalahan utama di wilayah Ciayumajakuning adalah ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan kota. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Indramayu, tumbuh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga menimbulkan tantangan dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), upah minimum, dan belanja

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Ciayumajakuning untuk periode 2020–2024.

Menurut Sukirno, inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan di pasar. Laju inflasi menggambarkan persentase peningkatan harga dalam periode tertentu. Dalam kondisi tertentu, inflasi bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan ratusan hingga ribuan persen per tahun, yang dikenal sebagai hiperinflasi, biasanya akibat resesi atau faktor lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi karena ketidakstabilan harga dapat menurunkan daya beli dan menghambat aktivitas ekonomi (Sadulloh & Rahmi, 2022).

Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang menunjukkan daya beli masyarakat dan tekanan harga, sehingga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perubahan harga barang dan jasa, baik secara nasional maupun di tingkat lokal, memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menentukan pola konsumsi domestik (Rofiqoh et al., 2025). Di wilayah Ciayumajakuning, inflasi lokal tekanan harga komoditas tertentu, maupun fluktuasi harga pasca-pandemi memainkan peran penting dalam menentukan daya beli masyarakat dan peningkatan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada operasi sektor perdagangan dan jasa.

Variabilitas inflasi, atau fluktuasi harga yang tidak stabil, menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses pemulihan ekonomi, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang rentan terhadap guncangan eksternal (Zalukhu et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan inflasi di tingkat lokal menjadi penting sebagai dasar untuk membantu pemerintah daerah membuat rencana Pembangunan yang lebih efisien, sehingga pertumbuhan ekonomi di Ciayumajakuning dapat lebih stabil dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dan Mahinshapuri (2022), menunjukkan bahwa peningkatan inflasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenaikan tingkat inflasi yang diikuti peningkatan suku bunga dapat menyebabkan penurunan daya beli Masyarakat dan melemahnya aktivitas investasi,

sehingga pertumbuhan ekonomi terdorong melambat. Maka dari itu, stabilitas harga menjadi factor penting dalam menjaga keseimbangan permintaan agregat dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional (Mayasari & Mahinshapuri, 2022).

Tabel 1. 2
Inflasi Di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024

Tahun	Kota Cirebon (%)	Kab. Cirebon (%)	Kab. Indramayu (%)	Kab. Majalengka (%)	Kab. Kuningan (%)
2020	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
2021	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
2022	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86
2023	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22
2024	1,11	1,11	1,11	1.6	1,11

Sumber : Badan Pusat Statistik kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, inflasi di Ciayumajakuning pada tahun 2020-2024 secara umum mengacu pada data inflasi kota Cirebon sebagai representasi inflasi regional. Pada tahun 2020-2021, inflasi relatif rendah yaitu sebesar 1,17 persen dan meningkat menjadi 1,81 persen, kemudian mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 4,86 persen. Pada tahun 2023, inflasi Kembali menurun menjadi sekitar 1,11 persen. Kemudian, pada tahun 2024 kabupaten majalengka menunjukkan tingkat inflasi yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 1,6 persen, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dinamika harga antar daerah di Ciayumajakuning.

Selain inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menjadi permasalahan yang memberi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk Ciayumajakuning. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan resesi ekonomi yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Hal ini terutama terjadi dalam sektor UMKM, pariwisata, dan manufaktur kecil (Darmawan & Mifrahi, 2022). Penelitian oleh Damanik dan damanik (2023), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang tinggi. Tingginya angka pengangguran dapat

mengurangi akumulasi modal manusia serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, membuka lapangan pekerjaan yang banyak yang berkualitas menjadikan langkah yang krusial untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Damanik & Damanik, 2023).

Setelah pandemi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak hanya bertambah tetapi juga mengalami perubahan dalam strukturnya. Perubahan ini ditandai dengan munculnya pengangguran yang memiliki pendidikan lebih tinggi serta kurangnya kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja lokal secara efektif karena keterbatasan keterampilan. Selain pengangguran terbuka, masalah pengangguran terselubung atau underemployment juga muncul. Dalam situasi ini, tenaga kerja bekerja dengan jam yang tidak mencukupi sehingga penghasilan dan produktivitasnya terbatas, yang akhirnya menghambat kesejahteraan rumah tangga. Berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Arif Novriansyah (2018) di Gorontalo, menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran yang terjadi ketika jumlah angkatan kerja meningkat tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang cukup memiliki pengaruh besar dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi (Anggraini & Warsitasari, 2023).

Tabel 1.3

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Karakteristik Pengangguran	Tahun	Kab. Cirebon (%)	Kota Cirebon (%)	Kab. Indramayu (%)	Kab. Majalengka (%)	Kab. Kuningan (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka	2020	11.52	10.97	9.21	5.84	11.22
	2021	10.38	10.53	8.30	5.71	11.68
	2022	8.11	8.42	6.49	4.16	9.81
	2023	7.65	7.66	6.46	4.12	9.49
	2024	6.74	6.29	6.25	4.01	7.78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.3 data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Ciayumajakuning pada periode 2020–2024, terlihat adanya tren penurunan pengangguran di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Cirebon mengalami

penurunan dari 11,52% pada tahun 2020 menjadi 6,74% pada tahun 2024, Kota Cirebon dari 10,97% menjadi 6,29%, dan Kabupaten Majalengka dari 5,84% menjadi 4,01%. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antar wilayah, dengan Kabupaten Kuningan terus mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan ekonomi lokal untuk menyerap tenaga kerja, terutama di sektor UMKM, manufaktur, dan pariwisata. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Upah minimum kabupaten atau kota di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan buruh melalui peningkatan penghasilan. Namun, implementasi upah minimum juga menciptakan trade-off antara kenaikan pendapatan pekerja dan kapasitas sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja. Peningkatan upah minimum dapat menimbulkan tekanan biaya bagi usaha mikro dan kecil, yang berdampak pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penundaan dalam merekrut tenaga kerja. Di sisi lain, kenaikan UMK juga dapat merangsang konsumsi lokal dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersifat kompleks (Anastasya et al., 2025).

Tabel 1. 4
Upah Minimum Di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Cirebon (rupiah)	Kota Cirebon (rupiah)	Kabupaten Indramayu (rupiah)	Kabupaten Majalengka (rupiah)	Kabupaten Kuningan (rupiah)
2020	2.196.416	2.219.487	2.297.931	1.944.166	1.882.642
2021	2.269.556	2.271.201	2.373.073	2.009.000	1.882.642
2022	2.279.982	2.304.943	2.391.567	2.027.619	1.908.102
2023	2.430.780	2.456.516	2.541.996	2.180.602	2.010.734
2024	2.517.730	2.533.038	2.623.697	2.257.871	2.074.666

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.4, terdapat tren kenaikan upah minimum di kabupaten atau kota di wilayah Ciayumajakuning setiap tahun. Kabupaten Indramayu mencatat UMK tertinggi dibanding kabupaten/kota lain, sedangkan Kabupaten Kuningan memiliki UMK terendah sepanjang periode 2020–2023. Kenaikan paling signifikan terjadi di Kota Cirebon antara tahun 2022 dan 2023, dari Rp2.304.943 menjadi Rp2.456.516, menunjukkan adanya penyesuaian upah untuk menjaga daya beli pekerja di wilayah perkotaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Martini (2021) menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Kenaikan upah minimum dianggap dapat meningkatkan daya beli pekerja, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Mekanisme ini menjelaskan bagaimana peningkatan pendapatan pekerja dapat memperluas aktivitas ekonomi daerah melalui pergerakan sektor perdagangan dan jasa. Dengan demikian, kebijakan peningkatan UMP tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang dapat memperkuat dinamika pertumbuhan ekonomi regional (Lubis & Murtala, 2021).

Kenaikan UMK memiliki dua implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. *Pertama*, peningkatan upah berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, yang mendorong konsumsi rumah tangga serta pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Hal ini dapat memberikan multiplier effect terhadap ekonomi lokal, khususnya di wilayah dengan struktur konsumsi masyarakat yang tinggi. *Kedua*, kenaikan UMK juga menimbulkan tekanan biaya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dapat menunda perekrutan tenaga kerja baru atau bahkan memicu pengurangan pekerja. Oleh karena itu, Upah minimum kabupaten atau kota terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan tergantung pada kemampuan sektor usaha dalam menyesuaikan biaya, struktur ekonomi regional, serta pola konsumsi masyarakat.

Selain faktor inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum, belanja pemerintah daerah juga memiliki peranan penting tentang pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dalam

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat distimulasi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur, layanan publik, dan fasilitas penunjang pembangunan. Besarnya belanja pemerintah daerah selama periode tertentu mencerminkan kapasitas investasi pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Belanja pemerintah daerah, terutama belanja modal, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Belanja pemerintah daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan Pusung (2024), Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kualitas belanja lebih penting daripada kuantitasnya. Dengan meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, belanja pemerintah daerah yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB di daerah tersebut (Pusung et al., 2024).

Laju pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dipengaruhi oleh bagaimana Pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari pengeluaran modal dan pengeluaran rutin. Belanja rutin yang tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja modal yang lebih besar cenderung menguntungkan pertumbuhan ekonomi (Andersson Järnberg & Värja, 2023). Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal, pemerintah daerah Ciayumajakuning harus mengalokasikan anggaran secara efisien dengan proporsi yang tepat antara belanja modal dan rutin.

Dalam konteks tersebut, untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi pengeluaran pemerintah daerah, dilakukan analisis terhadap realisasi belanja pemerintah daerah, dilakukan analisis terhadap realisasi belanja pemerintah di Wilayah III Cirebon. Belanja Pemerintah, khususnya belanja modal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi publik melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas ekonomi. Dengan menganalisis perkembangan belanja pemerintah dari tahun ke tahun, dapat diidentifikasi pola alokasi anggaran serta kecenderungan kebijakan fiskal daerah

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya, disajikan data belanja pemerintah daerah Ciayumajakuning tahun 2020-2024.

Tabel 1. 5

Belanja Pemerintah Daerah Ciayumajakuning Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Belanja Pemerintah (Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Cirebon	296,952	361,540	314,156	392,791	478.775
Kota Cirebon	294,350	400,657	426,743	384,070	127,030
Kabupaten Indramayu	317,730	306,790	251,930	577,670	510,220
Kabupaten Majalengka	792,444	590,262	419,960	379,225	412,140
Kabupaten Kuningan	378,704	120,682	229.857	247,574	377,257

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.5, belanja pemerintah daerah di Ciayumajakuning pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang bervariasi antar wilayah. Kabupaten Cirebon cenderung meningkat dari Rp296,952 miliar pada 2020 menjadi Rp478,775 miliar pada 2024, sementara Kota Cirebon mengalami penurunan signifikan pada 2024 setelah mencapai puncak Rp426,743 miliar pada 2022. Kabupaten Indramayu dan Majalengka menunjukkan pola belanja yang tidak stabil, dengan kenaikan tajam pada beberapa tahun tertentu, sedangkan Kabupaten Kuningan fluktuatif namun meningkat kembali pada 2024. Tren ini menunjukkan pendekatan adaptif yang diterapkan pemerintah daerah saat memberikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program ekonomi lokal. Strategi ini secara langsung meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hanya sedikit penelitian yang secara bersamaan mengkaji inflasi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di Ciayumajakuning setelah pandemi. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi. Akibatnya, mereka tidak dapat mengungkap ketidakseimbangan pertumbuhan antar kabupaten atau kota atau perbedaan yang ditimbulkan oleh struktur ekonomi dan kapasitas fiskal masing-

masing wilayah (Erisyadi et al., 2025). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan lokal dengan menggabungkan keempat variabel tersebut ke dalam satu model analitis untuk periode 2020–2024. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru (Wiraja & Marwan, 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang ideal diharapkan mampu mencerminkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota (Zhulaikah, 2024). Capaian tersebut dapat terwujud melalui kestabilan inflasi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha dalam penetapan upah minimum, serta pengelolaan belanja pemerintah yang efisien dan tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, keempat faktor tersebut sering kali menunjukkan dinamika yang berbeda antarwilayah, termasuk di wilayah Ciayumajakuning.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait variabel yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sehingga peneliti merasa terdorong untuk menganalisis permasalahan ini secara ilmiah dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020–2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, berikut adalah poin identifikasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning belum menunjukkan pola yang merata antar daerah. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan tajam, sementara daerah lain seperti Kabupaten dan Kota Cirebon masih tumbuh moderat. Kondisi ini menandakan adanya perbedaan kapasitas fiskal dan struktur ekonomi antarwilayah.

- b. Inflasi yang fluktuatif, terutama pada tahun 2022, menimbulkan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan menghambat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan pengendalian harga yang terintegrasi di tingkat regional.
- c. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di beberapa daerah, seperti Kabupaten dan Kota Cirebon, masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Ciayumajakuning, yang menandakan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja produktif.
- d. Kenaikan upah minimum di Ciayumajakuning belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor UMKM, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.
- e. Dampak kebijakan fiskalnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi belum maksimal karena belanja rutin lebih banyak digunakan daripada belanja modal produktif.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai identifikasi Masalah di atas, terdapat berbagai masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Ciayumajakuning. Karena keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah tersebut, serta keterbatasan waktu yang peneliti miliki maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah inflasi, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Ciayumajakuning tahun 2020–2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024?

3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024?
4. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024?
5. Apakah Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan di Ciayumajakuning Tahun 2020-2024.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberi penulis lebih banyak wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning dari tahun 2020 hingga 2024.

2. Bagi Akademisi

Untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi regional, khususnya tentang pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Ciayumajakuning tahun 2020–2024, sebagai syarat untuk melanjutkan penelitian skripsi.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru tentang seberapa pengaruhnya Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning dari tahun 2020 hingga 2024.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ciayumajakuning dari tahun 2020 hingga 2024. Hasil-hasil ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau perbandingan untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian teori, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis. Teori-teori yang dibahas yaitu tentang inflasi, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai metode dan pendekatan penelitian, jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan unit observasi penelitian, jenis data, populasi dan sampel, uji persyaratan dan uji statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai data hasil penelitian dan pengujian hipotesis dan juga temuan penelitian dan menguraikan mengenai data penelitian dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kesimpulan dan saran. Bagian akhir yang terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.